



Analisis Peran KOMPAK dalam Meningkatkan Kesadaran Antikorupsi di Kalangan Pemuda di Bandar Lampung

Rizky Wahyudi

Universitas Lampung

Anung Mabilla

Universitas Lampung

Atika Sari Dewi

Universitas Lampung

Rima Yuni Saputri

Universitas Lampung

Ana Mentari

Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145

Korespondensi penulis: rizkywahyudi051@gmail.com

***Abstract** Youth plays a strategic role as agents of change in nation-building, including in efforts to eradicate corruption. This article analyzes the role of the Coalition of Society Concerned with Anti-Corruption (KOMPAK) in increasing anti-corruption awareness among young people. Through educational, empowerment, and capacity-building approaches, KOMPAK actively organizes seminars, workshops, social campaigns, and political education programs for youth in Lampung Province. This study uses observation and interview methods to explore KOMPAK's programs and their impact on developing anti-corruption character among the younger generation. The analysis reveals that KOMPAK serves not only as a platform for raising awareness but also as a driving force for social change by instilling values of integrity, responsibility, and active participation. Therefore, KOMPAK's presence exemplifies the critical role of youth organizations in fostering a clean and accountable governance system.*

***Keywords:** KOMPAK, Youth, Anti-Corruption, Political Education, Youth Empowerment*

Abstrak. Generasi muda memegang peran strategis sebagai agen perubahan dalam pembangunan bangsa, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi. Artikel ini menganalisis peran Koalisi Masyarakat Peduli Anti Korupsi (KOMPAK) dalam meningkatkan kesadaran antikorupsi di kalangan pemuda. Melalui pendekatan edukasi, pemberdayaan, dan pengembangan kapasitas, KOMPAK aktif menyelenggarakan seminar, workshop, kampanye sosial, serta pendidikan politik bagi pemuda di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara untuk menggali program-program KOMPAK dan dampaknya terhadap pembentukan karakter antikorupsi di kalangan generasi muda. Hasil analisis menunjukkan bahwa KOMPAK tidak hanya berfungsi sebagai wadah penyadaran, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan sosial yang menanamkan nilai integritas, tanggung jawab, dan partisipasi aktif. Peran pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan semakin diperkuat melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan secara sistematis dan berkelanjutan oleh organisasi ini. Dengan demikian, keberadaan KOMPAK menjadi contoh nyata pentingnya keterlibatan organisasi kepemudaan dalam menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Kata kunci: KOMPAK, Pemuda, Antikorupsi, Pendidikan Politik, Pemberdayaan Pemuda

LATAR BELAKANG

Indonesia, sebagai bangsa yang besar, memandang generasi mudanya sebagai pihak yang memiliki harapan besar untuk membawa perubahan yang positif bagi bangsa. Menurut Setiawan (2018), generasi muda adalah pewaris estafet kepemimpinan bangsa yang berperan sebagai penentu arah masa depan Indonesia. Mereka juga diidentifikasi sebagai agen perubahan sosial yang memiliki potensi untuk memperbaiki kondisi sosial, politik, dan ekonomi negara. Generasi

muda tidak hanya dipandang sebagai kelompok usia tertentu, tetapi sebagai elemen yang memiliki peran strategis dalam menciptakan masyarakat yang bebas dari praktik korupsi (Zulkarnain, 2020). Hal ini sejalan dengan pendapat Soetjipto (2015) yang menyatakan bahwa pembinaan karakter dan moralitas generasi muda menjadi kunci dalam pemberantasan korupsi, mengingat mereka memiliki kapasitas untuk mengubah budaya dan pola pikir yang selama ini mendukung perilaku koruptif. Oleh karena itu, upaya pembinaan generasi muda menjadi sangat penting, khususnya dalam membangun kesadaran tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Mulyana, 2017).

Pemuda merupakan elemen strategis dalam pembangunan bangsa dan negara. Di berbagai belahan dunia, pemuda tidak hanya dianggap sebagai penerus estafet kepemimpinan, melainkan sebagai kekuatan utama dalam mendorong perubahan sosial, politik, dan budaya. Namun, kondisi pemuda di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah krisis karakter. Fenomena ini ditandai dengan meningkatnya keterlibatan pemuda dalam perilaku menyimpang, rendahnya partisipasi sosial-politik, serta melemahnya semangat nasionalisme dan tanggung jawab sosial (Widiatmaka, Pramusinto, & Kodiran, 2016).

Organisasi kepemudaan hadir sebagai sarana strategis untuk membina, mendidik, dan memberdayakan pemuda agar mampu berperan secara positif dalam masyarakat. Sebagaimana ditunjukkan dalam studi yang dilakukan oleh Widiatmaka dkk. (2016), organisasi kepemudaan memiliki peran penting dalam membentuk karakter pemuda melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan kepemimpinan, pendidikan dasar, hingga kegiatan keagamaan dan sosial. Namun, tantangan seperti lemahnya koordinasi, minimnya partisipasi, serta dominasi kepentingan pribadi kerap menghambat efektivitas organisasi tersebut.

Salah satu LSM dan Organisasi kepemudaan yang fokus pada isu pemberantasan korupsi adalah Koalisi Masyarakat Peduli Anti Korupsi (KOMPAK). Organisasi ini hadir sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap maraknya praktik korupsi di berbagai lini kehidupan. KOMPAK berperan aktif dalam mengedukasi publik, mengadvokasi kebijakan anti korupsi, serta menjadi mitra kritis pemerintah dalam mengawasi implementasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dengan mengusung semangat kolektif dan partisipatif, KOMPAK menempatkan diri sebagai wadah perjuangan masyarakat yang menginginkan perubahan nyata dalam sistem pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.

Korupsi di Indonesia merupakan salah satu masalah sosial yang tampaknya tak kunjung usai untuk diperbincangkan. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan, tetapi juga mencerminkan kesulitan dalam pemberantasannya. Hambatan utama dalam memerangi korupsi adalah lemahnya aparat penegak hukum, yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah

(Azhar, 2024). Korupsi masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia di era Reformasi. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak berdirinya lembaga tersebut pada tahun 2003 hingga 2018, telah tercatat sebanyak 119 kepala daerah, 247 anggota legislatif, dan 238 pihak swasta terlibat dalam kasus korupsi (Roshady, 2021). Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dirilis Transparency International pada tahun 2019 menempatkan Indonesia di peringkat 85 dari 180 negara, menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih menghadapi tantangan besar (Roshady, 2021). Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi perdebatan panjang, dengan koalisi masyarakat sipil yang aktif menolak upaya pelemahan KPK melalui regulasi baru (Roshady, 2021). Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan kegagalan gerakan masyarakat sipil dalam menolak revisi UU KPK, dengan pendekatan teori gerakan sosial dan mobilisasi sumber daya.

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Fenomena ini tidak hanya melemahkan institusi negara, tetapi juga merusak nilai-nilai moral dan etika publik. Di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan melalui berbagai strategi, baik secara hukum maupun edukatif. Namun demikian, indeks persepsi korupsi Indonesia masih menunjukkan posisi yang memprihatinkan di tingkat global, menandakan bahwa korupsi belum sepenuhnya dapat dikendalikan secara sistematis.

Salah satu pendekatan yang dinilai efektif dalam pencegahan korupsi jangka panjang adalah melalui pendidikan antikorupsi. Pendidikan ini tidak hanya ditujukan untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan integritas generasi muda. Sebagaimana dikemukakan dalam studi oleh Suyatno (2020), penanaman nilai antikorupsi melalui pendidikan karakter di sekolah dapat membentuk sikap kritis dan tanggung jawab sosial peserta didik.

Peran institusi pendidikan tinggi juga sangat vital dalam membangun kesadaran antikorupsi di kalangan mahasiswa. Penelitian oleh Nasution (2021) menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum perguruan tinggi berdampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum dan moral mahasiswa. Hal ini diperkuat oleh hasil studi dari Nugroho (2019) yang menyatakan bahwa mahasiswa yang mendapat pembelajaran etika dan antikorupsi lebih cenderung menolak perilaku manipulatif dan tidak jujur dalam kehidupan akademik maupun sosial.

Di samping itu, literasi digital juga dapat menjadi media efektif dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi. Penelitian oleh Raharjo dan Fatimah (2022) menunjukkan bahwa kampanye digital antikorupsi mampu meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan terhadap praktik penyimpangan di sektor publik. Melalui berbagai pendekatan multidisipliner

tersebut, pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum, melainkan juga dunia pendidikan dan masyarakat sipil secara luas.

Dalam rangka mencapai masyarakat yang demikian, diperlukan upaya berkelanjutan dalam mencegah dan memberantas berbagai tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi (Tuesang, 2018). Korupsi telah berkembang secara perlahan menjadi ancaman serius yang dapat merusak perekonomian negara. Tanpa disadari, praktik korupsi yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan kerugian besar, tidak hanya dalam sektor ekonomi, tetapi juga dalam aspek politik, sosial budaya, hingga stabilitas keamanan nasional.

Keberadaan KOMPAK tidak hanya menunjukkan pentingnya partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga mencerminkan kesadaran kolektif bahwa perubahan sistemik membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen bangsa. Pendahuluan ini akan menjadi dasar untuk memahami lebih dalam mengenai visi, misi, program kerja, serta kontribusi nyata KOMPAK dalam membangun Indonesia yang lebih bersih dan berintegritas.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis ini akan menguraikan landasan konseptual tentang peran pemuda dalam gerakan antikorupsi, teori-teori tentang pemberdayaan pemuda, serta konsep gerakan sosial yang relevan dengan studi tentang KOMPAK. Bagian ini juga akan membahas penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam menganalisis peran KOMPAK dalam meningkatkan kesadaran antikorupsi di kalangan pemuda.

Pemuda sebagai Agen Perubahan Sosial

Dalam konteks pemberantasan korupsi, peran pemuda sebagai agen perubahan menjadi sangat krusial. Widiatmaka dkk. (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pemuda memiliki kapasitas untuk membangun ketahanan pribadi melalui pembentukan karakter yang kuat di organisasi kepemudaan. Ketahanan pribadi ini mencakup nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas yang menjadi fondasi penting dalam gerakan antikorupsi. Setiawan (2018) juga menguatkan pandangan bahwa generasi muda memiliki peran vital dalam pemberantasan korupsi melalui pendekatan preventif dan partisipatif.

Teori Pemberdayaan Pemuda

Pemberdayaan pemuda merupakan proses penguatan kapasitas, keterampilan, dan pengetahuan untuk memungkinkan mereka berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan dan perubahan sosial. Menurut konsep yang dikemukakan oleh Zimmerman (2020), pemberdayaan pemuda mencakup tiga dimensi utama: psikologis (meningkatkan kepercayaan diri dan kesadaran

kritis), sosial (membangun jaringan dan dukungan sosial), dan politis (meningkatkan akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan).

Dalam konteks gerakan antikorupsi, Mulyana (2017) berpendapat bahwa pemberdayaan generasi muda menjadi langkah strategis dalam membangun integritas bangsa. Pemberdayaan ini tidak hanya mencakup peningkatan pengetahuan tentang korupsi, tetapi juga pengembangan keterampilan praktis dalam mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan praktik korupsi. Soetjipto (2015) menambahkan bahwa pembinaan karakter menjadi elemen penting dalam pemberdayaan pemuda untuk memerangi korupsi, karena karakter yang kuat dapat membentengi generasi muda dari godaan untuk melakukan praktik koruptif.

Teori Gerakan Sosial

Teori ini menekankan pentingnya kondisi politik yang kondusif untuk keberhasilan gerakan sosial. Roshady (2021) dalam penelitiannya tentang gerakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi mendemonstrasikan bagaimana struktur kesempatan politik mempengaruhi efektivitas gerakan antikorupsi di Indonesia.

Pendidikan Antikorupsi untuk Pemuda

Pendidikan antikorupsi merupakan instrumen penting dalam membangun kesadaran dan kompetensi untuk mengenali, mencegah, dan melawan korupsi. Menurut Zulkarnain (2020), pendidikan antikorupsi bagi generasi muda Indonesia perlu diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik formal maupun non-formal. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik.

Organisasi Kepemudaan dan Gerakan Antikorupsi

Organisasi kepemudaan memiliki peran sentral dalam gerakan antikorupsi di berbagai negara. Penelitian Widiatmaka dkk. (2016) menunjukkan bahwa organisasi kepemudaan berperan dalam membangun karakter pemuda yang berdampak pada ketahanan pribadi mereka dalam menghadapi tantangan, termasuk godaan untuk melakukan korupsi. Organisasi kepemudaan menjadi wadah untuk mengembangkan nilai-nilai antikorupsi melalui berbagai kegiatan yang dirancang secara sistematis.

Saputra (2022) dalam penelitiannya tentang gerakan antikorupsi di kalangan mahasiswa menemukan bahwa organisasi kemahasiswaan yang fokus pada isu antikorupsi memiliki dampak signifikan dalam membentuk sikap dan perilaku antikorupsi di kalangan anggotanya. Partisipasi aktif dalam organisasi tersebut meningkatkan pemahaman tentang dampak negatif korupsi dan menumbuhkan komitmen untuk memperjuangkan tata kelola yang bersih dan berintegritas.

Jaringan Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi

KOMPAK merupakan bagian dari jaringan masyarakat sipil yang berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut Azhar (2024), lembaga swadaya masyarakat memiliki peran strategis dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada pihak berwenang. Peran ini menjadi sangat penting mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengawasi setiap praktik korupsi di berbagai sektor.

Roshady (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bagaimana koalisi masyarakat sipil antikorupsi berperan dalam menolak agenda revisi UU KPK yang dipandang dapat melemahkan pemberantasan korupsi. Meski menghadapi berbagai tantangan, gerakan masyarakat sipil ini menunjukkan pentingnya suara publik dalam proses pengambilan kebijakan terkait pemberantasan korupsi.

Strategi Advokasi Antikorupsi

Strategi advokasi menjadi elemen penting dalam gerakan antikorupsi yang dimotori oleh organisasi kepemudaan seperti KOMPAK. Menurut Purnomo (2021), advokasi antikorupsi mencakup serangkaian upaya sistematis untuk mempengaruhi kebijakan, praktik, dan norma sosial yang berkaitan dengan korupsi. Strategi ini meliputi kampanye publik, lobi politik, litigasi strategis, dan mobilisasi massa.

Dalam konteks KOMPAK, strategi advokasi antikorupsi dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk pendidikan publik, pengawasan kebijakan, dan kampanye sosial. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Tuesang (2018) yang menekankan pentingnya pendekatan preventif dan partisipatif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Media Sosial dan Gerakan Antikorupsi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, memberikan peluang baru bagi gerakan antikorupsi untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan partisipasi publik. Menurut Kurniawan (2023), media sosial menjadi platform strategis bagi pemuda untuk menyuarakan kritik, berbagi informasi, dan memobilisasi dukungan dalam gerakan antikorupsi.

KOMPAK sebagai organisasi kepemudaan yang berfokus pada isu antikorupsi juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dan kampanye. Strategi ini sejalan dengan temuan Hidayat (2021) yang menunjukkan efektivitas media sosial dalam meningkatkan kesadaran antikorupsi di kalangan generasi muda. Media sosial tidak hanya menjadi ruang informasi, tetapi juga arena deliberasi publik tentang isu-isu korupsi dan tata kelola pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan bertujuan untuk menyelidiki populasi maupun sampel penelitian. Pengambilan sampel biasanya dilakukan secara acak atau menggunakan teknik random sampling, sedangkan pengumpulan data memanfaatkan instrumen penelitian yang telah dirancang sebelumnya. Analisis data dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, dapat diukur, dan diarahkan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya (Sugiyono, 2015). Metode ini memiliki karakteristik yang spesifik, dengan tahapan yang sistematis, terencana, dan terstruktur secara jelas sejak tahap perancangan hingga pelaksanaan penelitian..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Generasi muda merupakan pilar utama dalam pembangunan bangsa. Mereka bukan hanya sekadar penerus estafet kepemimpinan, melainkan juga agen perubahan sosial, politik, dan budaya. Dalam konteks Indonesia yang tengah menghadapi berbagai tantangan, seperti krisis karakter dan rendahnya partisipasi sosial-politik, kehadiran organisasi kepemudaan menjadi sangat vital. Salah satu organisasi yang secara khusus berfokus pada pemberantasan korupsi melalui pelibatan generasi muda adalah **Koalisi Masyarakat Peduli Anti Korupsi (KOMPAK)**. Organisasi ini didirikan pada 2 Mei 2015 di Bandar Lampung, sebagai respons terhadap keresahan masyarakat atas maraknya kasus korupsi, khususnya di daerah Lampung. Dipimpin oleh Noor Achmad Aziz, KOMPAK berupaya menjadi oposisi terhadap segala bentuk praktik korupsi dengan mengedepankan prinsip kolektivitas, pendidikan, dan advokasi di kalangan masyarakat muda.

Struktur dan Visi Misi KOMPAK

Dalam menjalankan misinya, KOMPAK memiliki struktur organisasi yang rapi dan fungsional. Dipimpin oleh seorang ketua umum, didukung oleh wakil ketua, sekretaris umum, bendahara umum, dan beberapa divisi khusus, organisasi ini membagi tugas secara terstruktur untuk memastikan keberlangsungan program-programnya. Divisi-divisi tersebut, seperti Divisi Hukum dan HAM, Audit dan Investigasi, Litbang dan Umum, hingga Divisi Sosial dan Sumber Daya, berfungsi untuk menangani berbagai aspek pemberantasan korupsi.

Visi yang diusung oleh KOMPAK adalah menjadi lembaga terdepan di Provinsi Lampung dalam pengembangan ilmu pendidikan anti korupsi, baik di tingkat lokal maupun global. Untuk mewujudkan visi ini, KOMPAK menetapkan misi antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, melakukan pengkajian terhadap kasus korupsi di

instansi publik, serta melaksanakan sosialisasi anti korupsi kepada masyarakat luas, termasuk di lingkungan pendidikan dan pemerintahan. Tidak hanya itu, tujuan yang ingin dicapai KOMPAK meliputi meratifikasi undang-undang tindak pidana korupsi menjadi lebih tegas, mengembangkan semangat kebersamaan, serta membentuk pemimpin-pemimpin muda yang berintegritas tinggi.

Program Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda

Salah satu kekuatan utama KOMPAK terletak pada program penyadaran dan pemberdayaan pemuda. Program penyadaran dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan edukatif seperti penyuluhan ke sekolah-sekolah, kampus, dan komunitas lokal. KOMPAK juga mengadakan diskusi publik, seminar, serta kampanye di media sosial untuk membangun kesadaran akan pentingnya memerangi korupsi sejak usia muda. Melalui metode ini, anak muda tidak hanya diajarkan tentang definisi korupsi, melainkan juga diajak memahami dampaknya yang sistemik terhadap masyarakat dan negara.

Lebih dari sekadar penyadaran, KOMPAK juga mengedepankan pemberdayaan pemuda. Mereka tidak sekadar menjadi peserta pasif, tetapi didorong menjadi aktor langsung dalam gerakan anti korupsi. Pelatihan kader antikorupsi menjadi salah satu program unggulan, di mana pemuda dibekali kemampuan advokasi, komunikasi publik, serta pemantauan kebijakan publik. KOMPAK juga menyediakan program pengembangan kepemimpinan berbasis integritas, workshop penulisan kebijakan, hingga mentoring langsung bersama tokoh-tokoh antikorupsi nasional. Dengan membekali generasi muda dengan ilmu dan keterampilan praktis, diharapkan mereka tumbuh menjadi pemimpin masa depan yang jujur dan kompeten.

Peran Strategis Pemuda di KOMPAK

Dalam lingkungan organisasi KOMPAK, pemuda memiliki peran yang sangat strategis. Mereka bertindak sebagai kekuatan moral yang menjaga nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan integritas dalam setiap kegiatan organisasi. Dengan semangat idealisme yang tinggi, pemuda menjadi penjaga arah perjuangan organisasi agar tetap konsisten melawan praktik-praktik koruptif. Selain itu, pemuda juga menjalankan peran sebagai kontrol sosial. Melalui pengawasan terhadap kebijakan publik, pelayanan masyarakat, dan anggaran daerah, mereka aktif memberikan kritik konstruktif dan masukan kepada pemerintah maupun lembaga publik lainnya.

Tak kalah penting, pemuda juga mengambil posisi sebagai agen perubahan (*agent of change*). Dalam peran ini, mereka tidak hanya mengkritisi ketidakadilan dan praktik korupsi, tetapi juga berinisiatif merancang dan melaksanakan solusi nyata melalui berbagai inovasi sosial. Dengan pendekatan berbasis data, teknologi, dan partisipasi masyarakat, pemuda KOMPAK berusaha mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Program Pendidikan Politik Pemuda

Pendidikan politik menjadi aspek krusial yang mendapat perhatian serius dari KOMPAK. Program ini bertujuan membekali pemuda dengan pemahaman mendalam mengenai sistem politik, fungsi lembaga legislatif dan eksekutif, serta pentingnya partisipasi publik dalam proses demokrasi. Salah satu bentuk kegiatannya adalah kelas diskusi politik, di mana topik-topik seperti demokrasi, sistem pemilu, peran lembaga legislatif, hingga korupsi politik dibahas secara interaktif.

Selain itu, KOMPAK secara rutin mengadakan kajian terhadap isu-isu politik terkini. Kajian ini tidak hanya memperkaya wawasan anggota tentang fenomena yang sedang berkembang, tetapi juga melatih mereka untuk menyikapi isu-isu tersebut secara kritis dan proporsional. Dengan pendekatan ini, diharapkan para pemuda tidak hanya menjadi pengamat politik, melainkan mampu berperan sebagai aktor perubahan dalam dunia politik yang bersih dan berintegritas.

Program Unggulan KOMPAK dalam Penyadaran Antikorupsi

Dalam upaya memperluas jangkauan pendidikan antikorupsi, KOMPAK mengembangkan beberapa program unggulan. Seminar anti korupsi menjadi salah satu kegiatan utama, dengan menghadirkan akademisi, praktisi hukum, dan pejabat lembaga negara seperti KPK atau Ombudsman untuk memberikan materi tentang bahaya korupsi dan strategi pencegahannya. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta dan membuka ruang diskusi terbuka.

Selain seminar, KOMPAK juga menyelenggarakan workshop anti korupsi yang lebih aplikatif. Dalam workshop ini, peserta dilatih tentang teknik pemetaan risiko korupsi di komunitas, penyusunan laporan pengaduan yang efektif, hingga penggunaan aplikasi pelaporan online. Tak kalah penting, program kajian rutin internal diadakan untuk memperkuat kapasitas intelektual anggota dalam memahami prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

KESIMPULAN DAN SARAN

Koalisi Masyarakat Peduli Anti Korupsi (KOMPAK) membuktikan bahwa organisasi kepemudaan mampu menjadi kekuatan moral, kontrol sosial, sekaligus agen perubahan dalam membangun masyarakat yang lebih bersih dari praktik korupsi. Melalui penyadaran, pemberdayaan, pendidikan politik, dan program-program aplikatif, KOMPAK berhasil mencetak generasi muda yang tidak hanya kritis terhadap permasalahan sosial, tetapi juga aktif berkontribusi dalam gerakan antikorupsi.

Peran aktif pemuda di dalam KOMPAK menunjukkan bahwa dengan pembinaan yang tepat, pemuda dapat menjadi motor penggerak perubahan sosial yang signifikan. Mereka tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga menjadi pelopor budaya antikorupsi dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara. Karena itu, mendukung keberlanjutan organisasi-organisasi kepemudaan seperti KOMPAK merupakan langkah strategis dalam membangun masa depan bangsa Indonesia yang lebih bersih, adil, dan berintegritas.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Hidayat, M. (2021). Pemanfaatan media sosial dalam kampanye antikorupsi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 6(2), 87-102.
- Kurniawan, A. (2023). Media sosial sebagai instrumen gerakan antikorupsi di kalangan pemuda. *Jurnal Sosiologi Digital*, 5(1), 45-59.
- Mulyana, A. (2017). Pemberdayaan generasi muda dalam membangun integritas. *Jurnal Pendidikan Anti-Korupsi*, 4(1), 95-112.
- Nasution, A. (2021). *Integrasi Nilai Antikorupsi dalam Pendidikan Tinggi*. *Jurnal Civic Education*, 5(2), 145–156.
- Nugroho, B. (2019). *Efektivitas Pendidikan Etika dan Antikorupsi pada Mahasiswa*. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(1), 78–89.
- Purnomo, H. (2021). Strategi advokasi antikorupsi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(3), 178-193.
- Raharjo, S., & Fatimah, N. (2022). *Literasi Digital dalam Kampanye Antikorupsi: Studi di Kalangan Mahasiswa*. *Jurnal Komunikasi dan Sosial Humaniora*, 14(2), 201–210.
- Roshady, M. (2021). *Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dalam Menolak Agenda Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2019*. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 2(1), 14-26. doi:<https://doi.org/10.15408/jisi.v2i1.22952>
- Saputra, R. (2022). Gerakan antikorupsi di kalangan mahasiswa: Studi kasus pada organisasi mahasiswa di Universitas Indonesia. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 3(2), 67-82.
- Setiawan, R. (2018). *Peran Generasi Muda dalam Pemberantasan Korupsi*. *Jurnal Pembangunan Bangsa*, 12(1), 45-59.
- Soetjipto, A. (2015). *Peran Pembinaan Karakter dalam Pemberantasan Korupsi di Kalangan Generasi Muda*. *Jurnal Sosial dan Politik*, 9(3), 77-88.

- Suyatno. (2020). *Pendidikan Antikorupsi melalui Penguatan Karakter di Sekolah*. Jurnal Ilmu Pendidikan, 26(1), 11–18.
- Wicaksono, D. Y. (2021). *Evaluasi Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(2), 235–252.
- Widiatmaka, P., Pramusinto, A., & Kodiran. (2016). *Peran Organisasi Kepemudaan dalam Membangun Karakter Pemuda dan Implikasinya terhadap Ketahanan Pribadi Pemuda (Studi pada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah)*. Jurnal Ketahanan Nasional, 22(2), 180–198.
- Zimmerman, M. A. (2020). Empowerment theory: Psychological, organizational, and community levels of analysis. *Handbook of Community Psychology*, 2, 43-63
- Zulkarnain, H. (2020). *Pendidikan Anti-Korupsi bagi Generasi Muda Indonesia*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 16(2), 123-135.

Artikel Prosiding

- Tuesang, H. (2018). Pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendekatan partisipatif. *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Kebijakan*, 1, 45-57.

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

- Azhar, A. (2024). *Peran lembaga swadaya masyarakat dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Bantaeng* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Buku Teks

- Styawati, D. (2008). *KPK pemburu koruptor* (Cet. 1). Yogyakarta: Pustaka Timur.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.